



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 147 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
DARI JABATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI HATALAI  
DAN  
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI HATALAI  
KECAMATAN LEITIMUR SELATAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan usulan Saniri Negeri Hatalai melalui surat Nomor : 01/SN.H/2019, Tanggal 24 Januari 2019, Perihal Pengusulan Calon Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatalai, telah mengusulkan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon a.n. DOMINGGAS R. WAAS, S.Sos untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatalai;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan keadaan serta dalam rangka kepentingan dinas, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dengan hormat Saudara JOHN G. LAINSAMPUTTY dari jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatalai;
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara DOMINGGAS R. WAAS, S.Sos, dinilai telah memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang kepemimpinan dan administrasi pemerintahan, sehingga dipandang layak, cakap, dan mampu untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatalai Kecamatan Leitimur Selatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatalai Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatalai Kecamatan Leitimur Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332);

MEMUTUSKAN :

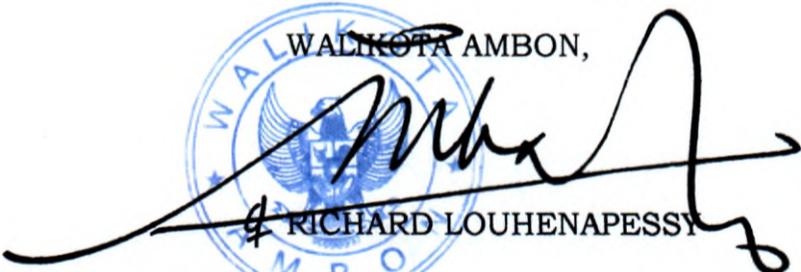
Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara JOHN G. LAINSAMPUTTY dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatalai Kecamatan Leitimur Selatan dengan mengucapkan terima kasih atas Darma Bakti, serta jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah dan Negeri Hatalai.

- KEDUA Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara DOMINGGAS R. WAAS, S.Sos sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatalai Kecamatan Leitimur Selatan.
- KETIGA : Tugas Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatalai adalah :
1. Melanjutkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat di Negeri Hatalai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mempersiapkan proses Pengangkatan/Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hatalai yang definitif;
  3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatalai bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Camat.
- KELIMA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatalai adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Penetapan dan berakhir sampai dengan Bulan Maret 2020, dan atau karena kepentingan dinas diberhentikan dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan Keputusan Walikota.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Hatalai Kecamatan Leitimur Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 1 Maret 2019

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Leitimur Selatan;
5. Dan Ramil 1504-02 Leitimur Selatan;
6. Kapolsek Kecamatan Leitimur Selatan;
7. Saniri Negeri Hatalai;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.